

## BUPATI BATANG TAMBAH ANGGARAN INFRASTRUKTUR DI SAAT EFISIENSI



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/WANSUS-Wawancara-khusus-Tribun-Jateng-dengan-Bupati-Batang-M-Faiz-Kurniaw.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Bupati Batang M Faiz Kurniawan memiliki strategi khusus untuk perbaiki infrastruktur.

Di saat efisiensi anggaran justru Bupati kelahiran 1991 ini menambah anggaran puluhan miliar untuk perbaiki jalan, jembatan, ruang kelas, PJU dan sebagainya.

Berikut wawancara khusus Tribun Jateng bersama Bupati Batang, M Faiz Kurniawan.

Efisiensi Anggaran dan Infrastruktur Kabupaten Batang di 2025.

Bagaimana dampaknya bagi Kabupaten Batang? Apakah ada alokasi anggaran infrastruktur di tahun 2025?

Kabupaten Batang memiliki luas 78 ribu hektare dengan populasi sekitar 800 ribu jiwa.

Jika kita melihat proporsi jumlah penduduk dengan luas geografis, terjadi ketimpangan di mana masih banyak lahan yang belum padat penduduk.

Namun, kondisi ini tidak menghalangi kami untuk terus membangun infrastruktur yang dibutuhkan.

Efisiensi anggaran dari pusat sangat berdampak pada daerah, terutama karena banyak dana alokasi khusus yang sebelumnya diberikan kini dihilangkan.

Dana untuk infrastruktur dari provinsi juga turut dihapus, sehingga kami harus mencari solusi mandiri.

Namun, kami tetap berkomitmen bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, trotoar, dan irigasi adalah prioritas utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Saat saya mulai bertugas, kami langsung menyisir anggaran dan melakukan efisiensi, termasuk memotong 50 persen biaya perjalanan dinas serta menyesuaikan satuan harga yang sebelumnya terlalu tinggi.

Kami juga menghilangkan pengeluaran yang tidak esensial, seperti pembelian kertas. Hasilnya, kami berhasil mengumpulkan Rp 68 Miliar yang langsung dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Dari anggaran tersebut, dana pembangunan jalan yang sebelumnya Rp 40 Miliar kami tambahkan Rp 15 miliar menjadi Rp 55 Miliar.

Ruang kelas yang semula tidak memiliki anggaran kini kami alokasikan Rp 5 Miliar untuk pembangunan dan renovasi sekolah.

Kami juga meningkatkan anggaran untuk penerangan jalan umum (PJU) dan irigasi. Justru, kondisi efisiensi ini menekan kami untuk berpikir lebih efektif dan efisien dalam mengelola anggaran daerah.

Dengan potensi sumber daya yang lengkap, bagaimana strategi Kabupaten Batang dalam mencapai swasembada pangan?

Saat ini, Batang sedang mengalami perkembangan industri yang pesat.

Agar tidak terjadi tumpang tindih antara sektor industri dan pertanian, kami menetapkan lima zona pengembangan, yaitu:

1. Zona industri
2. Zona pendidikan
3. Zona pelayanan publik
4. Zona bahari
5. Zona pertanian dan agrowisata

Zona pertanian dan agrowisata akan kami pertahankan agar tidak tiba-tiba berubah menjadi kawasan industri.

Dengan langkah ini, kami bisa menjaga ketahanan pangan daerah.

Kami memiliki target besar dalam lima tahun ke depan, yaitu menyediakan makanan bergizi gratis bagi warga Batang dari hasil produksi lokal.

Setelah itu, kami akan berupaya memenuhi seluruh kebutuhan pangan daerah secara mandiri dan bahkan mulai mengekspor produk unggulan Batang.

Beberapa komoditas unggulan kami meliputi beras, kopi, jagung, dan tebu.

Produksi gabah kami bisa mencapai 125 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan lokal hanya sekitar 80 ribu ton artinya ada surplus 45 ribu ton yang bisa kami suplai ke daerah lain.

Bahkan pada tahun 2023, kami mengalami musim panen luar biasa hingga mencapai 230 ribu ton beras dalam satu tahun.

Ke depan, kami akan semakin mengoptimalkan sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah.

Kabupaten Batang memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Apa dampak positifnya terhadap tenaga kerja lokal?

Presiden telah menetapkan tiga KEK di Batang, yaitu:

1. KEK industry
2. KEK pariwisata dan properti
3. KEK logistik

Dengan berbagai insentif yang ditawarkan, kami membangun kerja sama dengan Cina melalui program "Two Country Twin Park".

Kami telah memiliki sister city di Cina, yang berarti akan ada lebih banyak industri dari sana yang berinvestasi di Batang.

Untuk memastikan industri yang masuk memberi manfaat bagi tenaga kerja lokal, kami sedang menggodok peraturan daerah (Perda) yang mewajibkan perusahaan menyerap minimal 70-75 persen tenaga kerja dari Batang.

Jika ada kesenjangan kompetensi, kami siap memberikan pelatihan gratis agar masyarakat Batang memenuhi kualifikasi industri.

Kami telah menyiapkan 2.000 kuota untuk pelatihan kerja gratis tahun ini, yang didesain sesuai dengan kebutuhan industri.

Selain itu, bagi warga yang putus sekolah, kami menyediakan program pendidikan kejar paket secara gratis agar mereka bisa mendapatkan ijazah minimal SMA dan memenuhi syarat untuk bekerja.

Dengan langkah-langkah ini, kami memastikan bahwa KEK tidak hanya menghadirkan investasi, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat Batang.

Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Batang dalam meningkatkan pelayanan publik?

Pelayanan publik mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga administrasi dan investasi.

Saat ini, kami sedang menggodok sejumlah kebijakan untuk memastikan kemudahan akses bagi masyarakat.

Di sektor kesehatan, Batang memiliki dua rumah sakit yang kini sedang dikelola dengan baik dan mengalami reformasi.

Kami menerapkan Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh warga Batang, artinya siapa pun yang sakit akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, asalkan memiliki KTP Batang.

Bahkan bagi warga yang belum tercover BPJS, mereka tetap mendapatkan layanan gratis.

Pemkab Batang telah mengalokasikan hampir Rp 80 Miliar per tahun untuk memastikan bahwa BPJS dapat diaktifkan secara otomatis pada hari itu bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan, syaratnya cukup menunjukkan KTP sebagai warga Batang.

Dan untuk peningkatan fasilitas Pendidikan di Batang, kami terus mengevaluasi kondisi fasilitas pendidikan, terutama terkait kebutuhan ruang kelas.

Ketika terjadi ketimpangan, misalnya dari TK ke SD atau SD ke SMP, kami berupaya menambah jumlah ruang kelas agar semua anak mendapatkan tempat belajar yang layak.

Saya tidak ingin ada anak yang putus sekolah karena keterbatasan kuota di sekolah negeri atau tingginya biaya sekolah swasta.

Oleh karena itu, pembangunan ruang kelas menjadi salah satu prioritas kami.

Di sisi lain pada pelayanan publik, kami juga mempercepat pelayanan publik dengan inovasi "Sambangan Desa", sebuah program yang akan kami luncurkan setelah 100 hari kerja.

Dalam program ini, kami akan mendatangi desa-desa dengan membawa tim kesehatan untuk pemeriksaan gratis, tim dari Dukcapil untuk layanan administrasi kependudukan, serta tim pertanahan untuk memberikan pelayanan sertifikasi tanah, semua OPD yang terkait pelayanan akan saya bawa untuk melakukan pelayanan ke desa-desa.

Bagaimana Pemkab Batang menangani masalah rumah tidak layak huni?

Tahun ini, kami membantu sekitar 200 rumah melalui program bedah rumah dengan dana Rp18.500.000 per unit.

Fokus utama adalah memastikan rumah yang dibantu minimal tidak bocor, dengan menggandeng pihak swasta melalui CSR.

Kami memprioritaskan rumah yang dihuni oleh balita sebagai bagian dari upaya penurunan angka stunting.

Stunting tidak hanya berkaitan dengan kecukupan gizi, tetapi juga dengan kebersihan dan higienis lingkungan tempat tinggal.

Rumah yang sehat akan memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak.

Bagaimana perkembangan Program MBG di Kabupaten Batang ?

Saat ini, Batang sudah memiliki tiga dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) yang telah mencakup sekitar 9.000 pelajar, dan bulan depan akan bertambah sehingga mencakup 12.000 pelajar.

Kami bersyukur bahwa Batang terpilih sebagai salah satu dari lima kabupaten di Jawa Tengah yang akan mendapatkan pembangunan dapur besar langsung dari Badan Gizi.

Kami telah menyediakan lahan seluas 1,8 hektare untuk pembangunan dapur tersebut.

Ke depan program makan bergizi gratis akan diupayakan mencakup santri, panti asuhan, dan ibu hamil.

Selain itu, kami juga memiliki program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh), di mana masyarakat yang mampu dapat menyumbangkan makanan untuk anak-anak kurang mampu. Saat ini, program tersebut telah mencakup sekitar 3.000 anak.

### **Pesan Bupati Batang, M. Faiz kepada Masyarakat**

Apa fokus pembangunan Kabupaten Batang ke depan?

Kami akan mentrigger pertumbuhan ekonomi melalui dua sektor utama, yaitu industri dan wisata, selain tetap menggenjot sektor pertanian dan perikanan.

Kami memiliki tantangan besar dengan 28.000 pengangguran yang harus diserap ke dunia kerja.

Kesempatannya terbuka, dan kami telah menyiapkan pelatihan bagi mereka. Bahkan, dalam proses groundbreaking industri yang baru, saya langsung bernegosiasi dengan HRD dan meminta 3.000 tenaga kerja direkrut dari Batang.

Selain itu, bulan ini akan ada 250 tenaga kerja yang menjalani pelatihan di Tiongkok. Mereka akan menerima transfer knowledge dan transfer etos kerja selama enam bulan sebelum kembali ke Batang untuk siap bekerja.

Juga sudah ada yang mengikuti pelatihan di Vietnam, jika ada industri yang berdiri di Batang tetapi tidak memiliki anggaran untuk pelatihan, Pemkab siap menyediakan pelatihan sesuai kebutuhan perusahaan.

Jika pengangguran turun, maka masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pendapatan akan mulai berbelanja, spending per kapita meningkat, UMKM tumbuh, sektor pertanian berkembang, dan nelayan mendapatkan keuntungan dari peningkatan konsumsi.

Kami juga akan mengembangkan sektor wisata karena wisata adalah instrumen utama dalam mendatangkan orang ke Batang

Wisatawan yang datang akan berbelanja dan menggerakkan ekonomi daerah.

Kuartal pertama tahun ini saja, Batang telah menerima hampir 500 Ribu kunjungan wisatawan.

Jika rata-rata setiap wisatawan membelanjakan Rp 300 Ribu, maka perputaran ekonomi di Batang mencapai Rp150 Miliar.

Bagi generasi muda dan para pelajar, kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas saat ini terbuka luas. Beasiswa tersedia, mulai dari KIP Sekolah, KIP Kuliah, hingga LPDP.

Pendidikan mungkin bukan jaminan kesuksesan, tetapi dengan pendidikan yang baik, peluang untuk sukses jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki pendidikan yang layak.(din)

### **Sumber Berita:**

1. [https://jateng.tribunnews.com/2025/05/20/hebat-bupati-batang-m-faiz-kurniawan-tambah-anggaran-infrastruktur-di-saat-efisiensi?page=all#goog\\_rewarded](https://jateng.tribunnews.com/2025/05/20/hebat-bupati-batang-m-faiz-kurniawan-tambah-anggaran-infrastruktur-di-saat-efisiensi?page=all#goog_rewarded), “Hebat, Bupati Batang M Faiz Kurniawan Tambah Anggaran Infrastruktur di Saat Efisiensi”, tanggal 20 Mei 2025.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=7yB4f-SG6Lk>, “Habat, Bupati Batang Tambah Anggaran Infrastruktur di Saat Ef”, 22 Mei 2025.

### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa efisiensi Anggaran dan Infrastruktur Kabupaten Batang di 2025. Bagaimana dampaknya bagi Kabupaten Batang? Apakah ada alokasi anggaran infrastruktur di tahun 2025? Kabupaten Batang memiliki luas 78 ribu hektare dengan populasi sekitar 800 ribu jiwa. Pemkab Batang juga menghilangkan pengeluaran yang tidak esensial, seperti pembelian kertas. Hasilnya, Pemkab Batang berhasil mengumpulkan Rp 68 Miliar yang langsung dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Dari anggaran tersebut, dana pembangunan jalan yang sebelumnya Rp 40 Miliar kami tambahkan Rp 15 miliar menjadi Rp 55 Miliar. Ruang kelas yang semula tidak memiliki anggaran kini kami alokasikan Rp 5 Miliar untuk pembangunan dan renovasi sekolah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*